

INTERPRETASI, KUASA, DAN LEGITIMASI: TINJAUAN FILSAFAT SOSIAL TERHADAP PERAWATAN SITUS MAKAM EYANG MALANDANG

Rufus GoangSwaradesy¹, Dara Bunga Rembulan², Sophia Septiani³

^{1,2,3} Institut Seni Budaya Indonesia Bandung

^{1,2,3} Jalan Buah Batu no 212. Kota Bandung

¹ rufusgoang123@gmail.com, ² darabungarembulan@gmail.com, ³ septianisophia@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dimensi filosofis dari interpretasi, kuasa, dan legitimasi dalam perawatan warisan budaya Situs Makam Eyang Malandang di Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sisi interpretasi dari pihak pemerintah desa maupun warga lokal dalam melesatarikan dan merawat situs makam malandang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus interpretatif yang dilandaskan pada kerangka filsafat sosial kritis, mensintesikan teori strukturasi Giddens, konsep hegemoni Gramsci, dan hermeneutika Gadamer untuk menganalisis dinamika interpretasi, kuasa, dan legitimasi. Data diperoleh dari observasi lapangan dengan mengunjungi situs makam Eyang Malandang, wawancara, dan dokumentasi terkait pengelolaan situs makam. Informan penelitian terdiri dari pemerintah desa, kuncen, serta warga lokal. Analisis data dilakukan melalui pendekatan hermeneutika kritis untuk mengidentifikasi pola legitimasi, diikuti analisis wacana untuk memahami makna, dan interpretasi dialektis untuk mengungkap mekanisme kuasa yang terjadi terhadap situs makam Malandang. Hasil penelitian ini adalah interpretasi pemerintah daerah terkait perawatan situs makam Malandang menunjukkan sikap "netral". Namun, kentalan ini sekaligus menunjukkan sisi kuasa pemerintah daerah untuk menekan sisi sakralitas warga masyarakat yang berdampak pada perawatan situs makam yang cenderung diabaikan. Temuan mengungkap bahwa masyarakat mengembangkan resistensi diam melalui kegiatan pemeliharaan mandiri oleh kuncen maupun warga yang masih percaya dengan situs makam malandang secara turun-temurun.

Kata kunci: Interpretasi, Kuasa, Legitimasi, Perawatan situs makam, filsafat sosial.

ABSTRACT

This study examines the philosophical dimensions of interpretation, power, and legitimacy in the cultural heritage care of Eyang Malandang Tomb Site in Buahdua Subdistrict, Sumedang Regency, West Java. This research aims to examine the interpretations from both village government and local residents in preserving and caring for the Malandang tomb site. This study employs a qualitative approach with an interpretive case study method grounded in a critical social philosophy framework, synthesizing Giddens' structuration theory, Gramsci's concept of hegemony, and Gadamerian hermeneutics to analyze the dynamics of interpretation, power, and legitimacy. Data were obtained through field observation by visiting the Eyang Malandang tomb site, interviews, and documentation related to tomb site management. Research informants consisted of village government officials, custodians (kuncen), and local residents. Data analysis was conducted through a critical hermeneutics approach to identify legitimacy patterns, followed by discourse analysis to understand meanings, and dialectical interpretation to reveal power mechanisms occurring at the Malandang tomb site. The research findings show that local government interpretation regarding Malandang tomb site care demonstrates a "neutral" stance. However, this neutrality simultaneously reveals the local government's power dimension in suppressing the sacredness aspect of community members, which impacts tomb site care that tends to be neglected. The findings reveal that the community develops silent resistance through independent maintenance activities conducted by custodians and residents who still believe in the Malandang tomb site through hereditary tradition.

Keywords: Interpretation, power, legitimacy, tomb site care, social philosophy

PENDAHULUAN

Situs makam keramat di Indonesia tidak hanya menyimpan nilai historis dan spiritual, tetapi juga menjadi arena kompleks tempat beroperasinya dinamika kuasa, interpretasi, dan legitimasi yang saling bertarung. Situs Makam Eyang Malandang di Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, menjadi contoh menarik bagaimana warisan budaya tidak pernah netral secara filosofis. Di balik praktik perawatan dan pelestarian yang tampak sederhana, tersembunyi pertarungan makna antara sakralitas yang diyakini masyarakat dengan rasionalitas birokrasi pemerintah yang mencerminkan pergulatan antara tradisi dan modernitas. Dimensi filosofis yang muncul dari situs ini mengungkap paradoks menarik: bagaimana "kenetralan" pemerintah daerah justru menjadi bentuk kuasa yang halus untuk menekan dimensi sakral yang hidup dalam keseharian masyarakat. Fenomena ini menuntut pembacaan filosofis yang mendalam melalui lensa teori strukturalis Giddens, konsep hegemoni Gramsci, dan hermeneutika Gadamer untuk memahami bagaimana interpretasi, kuasa, dan legitimasi saling berkelindan dalam membentuk praktik perawatan situs makam. Resistensi diam yang dikembangkan masyarakat melalui pemeliharaan mandiri oleh kuncen dan warga setempat menjadi bukti bahwa dimensi filosofis situs ini tidak hanya teoretis, melainkan hidup dan beroperasi dalam realitas sosial yang konkret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam interpretasi yang berbeda antara pihak pemerintah desa dan warga lokal dalam upaya melestarikan dan merawat Situs Makam Eyang Malandang, dengan fokus pada dimensi filosofis yang melatarbelakangi perbedaan perspektif tersebut. Melalui pendekatan filsafat sosial kritis, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana interpretasi pemerintah desa yang cenderung "netral" dan rasional berhadapan dengan interpretasi warga lokal yang menekankan aspek sakralitas dan tradisi turun-temurun dalam praktik perawatan situs makam. Pemahaman terhadap dinamika interpretasi ini menjadi penting karena akan mengungkap mekanisme kuasa dan legitimasi yang

beroperasi dalam pengelolaan warisan budaya, sekaligus memberikan insight tentang bagaimana resistensi diam masyarakat melalui pemeliharaan mandiri menjadi strategi mempertahankan makna sakral situs di tengah tekanan sekularisasi dan birokratisasi yang dilakukan pemerintah daerah.

Penelitian serupa tentang perawatan warisan budaya telah dilakukan oleh (Faruk Fauzi, 2022) yang meneliti tentang perawatan warisan budaya merupakan salah satu cara membangun masa depan bangsa. penelitian (Sulistyanto, 2020) tentang konflik warisan budaya. penelitian tentang peran lembaga pemerintahan terkait dengan pengelolaan situs Cagar budaya diteliti oleh (Kuswandi et al., 2024; Maharani & Asri, 2020). terkait penelitian peran masyarakat sudah diteliti oleh (Putra et al., 2022; Subadyo, 2018; Wuryani & Purwiyastuti, 2012)

Bagi masyarakat lokal Buahdua, Sumedang, Situs Makam Eyang Malandang bukan sekadar kompleks pemakaman biasa, melainkan ruang sakral yang menyimpan memori kolektif dan energi spiritual yang dipercaya masih hidup hingga kini. Sosok Eyang Malandang dipandang sebagai tokoh berpengaruh yang jasanya terus dikenang dan dihormati melalui ritual-ritual tradisional serta praktik ziarah yang dilakukan secara turun-temurun. Interpretasi masyarakat terhadap situs ini melampaui dimensi fisik makam, melainkan sebagai pusat spiritual tempat mereka dapat berkomunikasi dengan arwah leluhur, memohon berkah, dan memperkuat ikatan dengan identitas budaya lokal. Makna sakral ini tercermin dalam berbagai praktik pemeliharaan yang dilakukan dengan penuh khidmat oleh kuncen dan warga setempat, dimana setiap tindakan perawatan tidak hanya bersifat fisik tetapi juga ritual yang menjaga kontinuitas hubungan antara dunia nyata dengan dunia spiritual, sehingga situs ini menjadi jembatan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan dalam kosmologi masyarakat Sumedang.

Perbedaan mendasar dalam interpretasi pengelolaan Situs Makam Eyang Malandang mencerminkan pertarungan ideologis antara dua paradigma yang saling bertentangan. Di satu sisi, pemerintah desa

cenderung mengambil sikap membiarkan situs dikelola secara minimal, bahkan menunjukkan keengganhan untuk terlibat aktif karena menganggap beberapa praktik yang dilakukan di situs tersebut berpotensi musyrik dan bertentangan dengan ajaran agama formal yang dianut mayoritas masyarakat. Sikap "netral" ini sesungguhnya merupakan bentuk kuasa yang halus untuk mendek legitimasi praktik-praktik spiritual tradisional yang dianggap tidak sesuai dengan ortodoksi religius modern. Sebaliknya, warga lokal justru mengharapkan pengelolaan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat karena mereka memandang situs ini sebagai ruang sakral yang memerlukan perawatan bersama sebagai bentuk tanggung jawab kolektif terhadap warisan leluhur. Kontradiksi interpretasi ini mengungkap bagaimana konsep "sakral" dan "musyrik" menjadi medan pertarungan makna yang mencerminkan tension antara spiritualitas tradisional dengan formalisme religius, dimana masing-masing pihak memiliki legitimasi dan kuasa interpretasi yang berbeda dalam mendefinisikan nilai dan fungsi situs makam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran sekilas tentang Situs Makam Eyang Buyut Malandang

Kompleks Situs Makam Eyang Buyut Malandang berlokasi di kawasan Buahdua, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, membentuk ensemble makam keramat yang menyimpan jejak sejarah panjang masyarakat Sunda. Kompleks pemakaman ini terdiri dari beberapa makam para leluhur terkemuka, termasuk Eyang Wirakusuma, Eyang Wirakutamaya, Eyang Agus Salam, dan Eyang Siti Candra Komalasari, sebagaimana dicatat dalam penelitian (Latifundia & Prijono, 2018). Keseluruhan struktur makam ditandai dengan penggunaan batu tegak dan material batu alam yang mencerminkan kesinambungan tradisi megalitik Nusantara. Arsitektur dan tata letak kompleks makam ini bukan sekadar warisan fisik, melainkan manifestasi konkret dari kontinuitas budaya dan memori sejarah masyarakat Sunda yang telah mengakar selama berabad-abad di wilayah tersebut.

Makam utama dalam kompleks ini adalah peristirahatan terakhir Raden Agus Salam Cakrakusuma, sosok berpengaruh yang diangkat sebagai Cutak (kepala wilayah) oleh ayahnya, Raden Kartadibrata Kusumahdinata IV, yang merupakan keturunan Raja Sumedang Larang di bawah hegemoni Kesultanan Mataram pada abad ke-17. Ketokohan Raden Agus Salam tidak hanya terletak pada posisi politiknya, tetapi juga pada jasa strategisnya dalam memimpin pasukan protokoler dan mengatur penyambutan bala tentara Mataram yang massive dalam persiapan menghadapi kekuatan VOC di Batavia, serta perannya yang vital dalam membuka wilayah Malandang untuk permukiman dan mengelola logistik militer (sumedangkab.go.id; inisumedang.com; kumparan.com). Dalam konteks Islamisasi Sumedang, figur seperti Eyang Buyut Malandang dipersepsikan sebagai agen penyebar Islam dan tokoh bersejarah yang jasanya diabadikan melalui keramat makamnya, mencerminkan proses akulturasi harmonis antara spiritualitas lokal dan ajaran Islam. Situs ini kemudian berkembang menjadi simbol kultural yang merepresentasikan identitas kolektif masyarakat Sumedang yang terikat pada kearifan lokal, seperti penghormatan kepada leluhur dan pelestarian seni tradisional pencak silat serta kendang yang kerap ditampilkan dalam berbagai ritual, menjadikan Makam Eyang Malandang sebagai pusat spiritualitas Sunda yang hidup dan dinamis.

Struktur Sosial dan Praktik ritual di Situs Makam Malandang

Dinamika sosial di sekitar Situs Makam Eyang Malandang diatur oleh hierarki kekerabatan tradisional dengan kuncen sebagai figur sentral yang berperan sebagai penjaga dan penafsir tradisi. Sebagai pemimpin spiritual, kuncen memiliki tanggung jawab menyeluruh mulai dari pelaksanaan ritual, interpretasi aturan adat, hingga pengelolaan relasi dengan para peziarah yang datang berkunjung. Keberadaan kuncen tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga sebagai mediator spiritual yang menghubungkan dunia arwah leluhur dengan komunitas hidup, sehingga aktivitas yang dipimpinnya secara otomatis

memperkuat legitimasi sosial dan kultural dari seluruh rangkaian ritual yang dilaksanakan. Struktur kepanitiaan ritual ini melibatkan keluarga besar Eyang Malandang dan keturunan kuncen dalam pembagian tugas yang sangat terlembagakan, dimana tugas sakral seperti pembacaan doa khusus (rajah) secara ekslusif dipercayakan kepada keturunan laki-laki tertua, sementara kaum perempuan bertanggung jawab atas penyiapan dan pengaturan sesaji, mencerminkan pembagian peran gender yang telah terinstitusionalisasi secara turun-temurun. Kompleksitas pengelolaan situs ini semakin bertambah dengan keterlibatan pemerintah daerah yang berperan dalam pengembangan infrastruktur dan promosi wisata religi, yang seringkali menciptakan tensi dengan prinsip kesakralan situs karena pembangunan fasilitas publik berpotensi mengubah pola penggunaan ruang sakral yang sebelumnya diatur secara ketat oleh norma adat. Relasi antara institusi adat dan pemerintah pun menunjukkan karakter simbiotis-konflik, dimana di satu sisi pemerintah memerlukan legitimasi dari kuncen untuk memanfaatkan situs sebagai aset pariwisata, namun di sisi lain kebijakan modernisasi seperti pengenalan sistem tiket masuk atau standardisasi fasilitas justru berpotensi mereduksi otoritas kuncen dalam proses pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan situs.

Salah satu bentuk dinamika sosial yang ada di sekitar situs adalah adanya mitos-mitos yang berkembang. Hal ini terkait dengan keberadaan sosok pendiri permukiman yakni Raden Agus Salam. Kawasan Buahdua menyimpan memori kolektif tentang sosok pendiri permukiman yang dikenal sebagai Eyang Buyut Malandang, yang dipercaya masyarakat setempat sebagai Raden Agus Salam, tokoh yang berjasa membuka hutan belantara untuk menciptakan ruang hunian bagi komunitas. Sosok Raden Agus Salam dikenal memiliki karakteristik kepemimpinan yang kuat, ditandai dengan keberanian dan keteguhan yang membuatnya disegani bahkan oleh Pemerintahan Kerajaan Mataram pada masanya. Pengaruh strategis Raden Agus Salam mencapai puncaknya ketika Kerajaan Mataram

merencanakan serangan terhadap Batavia pada abad ke-17, dimana sebagai keturunan Kerajaan Sumedang Larang, ia dipercaya mengemban misi penting menyambut ribuan pasukan Mataram yang akan menuju markas besar kongsi dagang Belanda VOC. Kemampuan diplomatik dan hospitalitasnya dalam menyediakan hidangan serta tempat peristirahatan yang memadai berhasil menciptakan kesan mendalam bagi pasukan Mataram, hingga Sultan Agung memberikan pengakuan dan kehormatan khusus kepada Raden Agus Salam atas jasanya.

Warisan spiritual dari sosok Eyang Buyut Malandang termanifestasi dalam sistem kepercayaan lokal yang melahirkan mitos tentang larangan mengucapkan kata "salam" ketika memasuki kompleks makamnya. Kepercayaan ini mengakar kuat dalam keyakinan masyarakat bahwa pelanggaran terhadap pantangan tersebut akan memicu murka leluhur yang dapat berwujud fenomena alam seperti angin kencang, pohon tumbang, atau sambaran petir sebagai bentuk ketidaksenangan atas sikap tidak hormat. Tradisi ini sesungguhnya mencerminkan filosofi etika Sunda yang mengatur tata cara berinteraksi dengan kokolot atau sesepuh yang dihormati, dimana menyebut nama secara langsung dianggap sebagai perilaku tidak sopan dan melanggar norma kesopanan. Kontinuitas kepercayaan ini dari generasi ke generasi menunjukkan kuatnya rasa hormat masyarakat terhadap jasa leluhur yang telah memberikan mereka tempat tinggal yang nyaman, sekaligus menjadi mekanisme sosial untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional dalam kehidupan kontemporer.

Struktasi, Hegemoni, dan Hermenutika

Teori strukturalis Anthony Giddens menawarkan kerangka teoretis untuk memahami hubungan dialektis antara struktur sosial dan agen (individu) dalam membentuk realitas sosial (Nashir, 2012). Menurut Giddens, struktur dan agen tidak berdiri sendiri melainkan saling mengkonstitusi melalui proses yang disebutnya sebagai "dualitas struktur" (duality of structure) (Giddens, 2010). Struktur sosial tidak hanya membatasi tindakan agen, tetapi juga menyediakan

sumber daya yang memungkinkan agen untuk bertindak, sementara tindakan agen secara berkelanjutan mereproduksi atau mentransformasi struktur yang ada. Dalam konteks Situs Makam Eyang Malandang, teori ini membantu menganalisis bagaimana struktur tradisional (seperti sistem kuncen, hierarki kekerabatan, dan aturan adat) membentuk tindakan masyarakat dalam merawat situs, sekaligus bagaimana praktik perawatan tersebut terus mereproduksi atau mengubah struktur yang ada ketika berhadapan dengan intervensi pemerintah daerah.

Antonio Gramsci mengembangkan konsep hegemoni sebagai bentuk dominasi yang tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik atau ekonomi, melainkan melalui konsensus ideologis dan budaya yang membuat kelompok yang didominasi menerima kepemimpinan kelompok dominan sebagai hal yang wajar dan legitimate (Siswati, 2017). Hegemoni bekerja melalui institusi-institusi sipil seperti sekolah, media, agama, dan tradisi budaya untuk menciptakan "common sense" atau pemahaman umum yang menguntungkan kelompok penguasa. Namun, Gramsci juga menekankan bahwa hegemoni tidak pernah lengkap dan selalu rentan terhadap counter-hegemoni atau resistensi dari kelompok yang didominasi (Ali, 2017). Dalam penelitian situs makam, konsep ini relevan untuk memahami bagaimana sikap "netral" pemerintah daerah sesungguhnya merupakan bentuk hegemoni yang berupaya mendeklegitimasi praktik spiritual tradisional, sementara resistensi diam masyarakat melalui pemeliharaan mandiri dapat dipahami sebagai bentuk counter-hegemoni yang mempertahankan worldview tradisional mereka.

Hans-Georg Gadamer mengembangkan hermeneutika filosofis yang menekankan bahwa pemahaman (understanding) selalu bersifat interpretatif dan tidak pernah bebas dari prasangka atau "pra-pemahaman" (fore-understanding) yang dibawa oleh penafsir (Judhananto & Sitorus, 2025). Menurut Gadamer (dalam Hasanah, 2017), pemahaman terjadi melalui "fusion of horizons" (peleburan horizon) antara horizon penafsir dengan horizon teks atau objek yang ditafsirkan, dimana kedua horizon tersebut saling

mempengaruhi dalam proses dialogis yang tidak pernah berakhir. Gadamer juga menekankan konsep "historically effected consciousness" yang menunjukkan bahwa pemahaman kita selalu dibentuk oleh tradisi dan sejarah yang melatarbelakangi kita. Dalam konteks penelitian ini, hermeneutika Gadamer memberikan tools untuk menganalisis bagaimana pemerintah desa dan warga lokal masing-masing memiliki horizon pemahaman yang berbeda tentang makna dan fungsi situs makam—horizon rasional-birokratis versus horizon spiritual-tradisional—and bagaimana kedua horizon ini berinteraksi, bertentangan, atau berpotensi untuk saling memperkaya dalam proses interpretasi yang berkelanjutan tentang pengelolaan warisan budaya.

Netralitas dan Sakralitas dalam pemeliharaan situs Makam Malandang

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan fundamental dalam interpretasi pengelolaan Situs Makam Eyang Malandang antara pemerintah daerah Buahdua dengan warga lokal dan kuncen makam. Pemerintah daerah mengambil posisi yang tampak "netral" dengan cenderung membiarkan pengelolaan situs berjalan apa adanya tanpa intervensi signifikan. Sikap ini dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa praktik-praktik yang dilakukan di situs makam seringkali dianggap musyrik dan bertentangan dengan ajaran agama formal yang dianut mayoritas masyarakat. Kenetralan ini sesungguhnya bukan merupakan posisi yang bebas nilai, melainkan bentuk kuasa yang halus untuk mendeklegitimasi praktik spiritual tradisional. Melalui lensa teori strukturalis Giddens, sikap pemerintah desa tersebut dapat dipahami sebagai strategi struktural yang secara tidak langsung membatasi reproduksi tradisi dengan mengurangi dukungan institusional, sehingga secara bertahap mengikis legitimasi praktik-praktik sakral yang dilakukan masyarakat.

Di sisi lain, interpretasi warga lokal dan kuncen makam menunjukkan perspektif yang kontras, dimana Situs Makam Eyang Malandang dipandang memiliki dimensi sakralitas dan nilai sejarah yang tinggi sehingga memerlukan perawatan dan pelestarian berkelanjutan. Bagi mereka, situs ini bukan sekadar kompleks

pemakaman, melainkan ruang spiritual yang menyimpan memori kolektif dan identitas budaya masyarakat Sumedang. Interpretasi ini mencerminkan apa yang oleh dikatakan Gramsci bahwa dimana kelompok yang didominasi (dalam hal ini masyarakat tradisional) mengembangkan pandangan alternatif yang menentang dominasi ideologis kelompok penguasa. Kuncen dan warga lokal mempertahankan makna sakral situs melalui praktik pemeliharaan mandiri, ritual-ritual tradisional, dan pewarisan nilai-nilai spiritual kepada generasi muda sebagai bentuk resistensi terhadap sekularisasi yang dipromosikan secara implisit oleh sikap netral pemerintah.

Perbedaan interpretasi ini dapat dianalisis melalui hermeneutika Gadamer sebagai yakni dengan istilah populernya Gadamer yakni "clash of horizons" antara horizon rasional-birokratis pemerintah dengan horizon spiritual-tradisional masyarakat. Horizon pemerintah dibentuk oleh prasangka modernitas yang memandang praktik tradisional memiliki potensi musyrik, sementara horizon masyarakat dibentuk oleh efek kesadaran sejarah yang melihat kontinuitas tradisi sebagai bagian integral dari identitas budaya mereka. Ketidakmampuan kedua pihak untuk mencapai titik temu horizon (pemahaman) mengakibatkan peluang terjadinya konflik interpretasi yang berdampak pada pengelolaan situs. Pemerintah, dengan memposisikan diri sebagai netral, sesungguhnya menolak untuk terlibat dalam proses hermeneutik yang asli, sementara masyarakat terpaksa mengembangkan strategi interpretasi defensif untuk mempertahankan makna yang mereka yakini.

Konsekuensi dari kontradiksi interpretasi ini adalah terciptanya dua sistem pengelolaan yang parallel dan seringkali bertentangan. Di satu sisi, minimnya dukungan pemerintah mengakibatkan kondisi fisik situs yang cenderung terabaikan dari segi infrastruktur dan fasilitas publik. Di sisi lain, dedikasi masyarakat dalam pemeliharaan spiritual dan ritual justru mempertahankan vitalitas situs sebagai ruang sakral yang hidup. Paradoks ini menunjukkan bagaimana struktur kuasa yang berupaya

memarginalisasi praktik tradisional justru memunculkan agen-agen resistensi yang mengembangkan mekanisme pelestarian alternatif. Melalui teori strukturalis Giddens, dapat dipahami bahwa tindakan resistensi masyarakat tidak hanya mereproduksi struktur tradisional, tetapi juga mentransformasinya dengan mengembangkan strategi-strategi baru untuk mempertahankan sakralitas situs di tengah tekanan modernisasi dan sekularisasi yang datang dari otoritas formal.

Temuan penelitian mengungkap adanya sistem legitimasi berlapis dalam pengelolaan situs, dimana otoritas formal pemerintah berhadapan dengan otoritas spiritual kuncen dan masyarakat adat. Konflik legitimasi ini mencerminkan apa yang oleh Gramsci disebut sebagai krisis hegemoni, dimana kelompok dominan gagal menciptakan konsensus ideologis yang kuat sehingga harus berhadapan dengan otoritas spiritual tradisional yang dimiliki oleh kuncen dan warga lokal. Kuncen, sebagai pemegang otoritas spiritual tradisional, memperoleh legitimasi dari pewarisan leluhur, sementara pemerintah memperoleh legitimasi dari struktur legal-formal.

Sikap "netral" yang diambil pemerintah desa Buahdua dalam pengelolaan Situs Makam Eyang Malandang sesungguhnya merupakan manifestasi dari teknologi kuasa yang halus dan tidak langsung. Kenetralan ini bukan merupakan posisi yang bebas nilai, melainkan strategi hegemonik yang secara sistematis berupaya meminggirkan sudut pandang spiritual tradisional masyarakat dengan cara tidak memberikan pengakuan resmi dan dukungan institusional terhadap praktik-praktik sakral yang berlangsung di situs tersebut. Melalui perspektif konsep hegemoni Gramsci, sikap netral pemerintah dapat dipahami sebagai upaya untuk menciptakan "common sense" baru yang memandang praktik spiritual tradisional sebagai sesuatu yang kuno, irasional, dan bahkan berpotensi musyrik, sehingga tidak layak mendapat dukungan dari otoritas formal. Dengan mengambil jarak dari dimensi sakral situs dan menolak untuk terlibat aktif dalam pelestariannya, pemerintah secara implisit melegitimasi proses sekularisasi yang bertujuan

mengurangi pengaruh spiritualitas tradisional dalam kehidupan publik.

Konsekuensi langsung dari sikap netral pemerintah adalah terbaikannya aspek-aspek perawatan fisik dan infrastruktur situs makam yang memerlukan dukungan sumber daya dan koordinasi institusional. Tanpa dukungan dari otoritas formal, inisiatif pelestarian yang dilakukan oleh kuncen dan masyarakat lokal menjadi terbatas pada upaya-upaya mandiri yang seringkali tidak memadai untuk menjaga kondisi optimal situs dalam jangka panjang. Melalui teori strukturalis Giddens, dapat dipahami bahwa struktur birokrasi yang "mengabaikan" situs secara tidak langsung menciptakan kondisi dimana agen-agen tradisional (kuncen dan masyarakat) kehilangan akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk mereproduksi dan mempertahankan tradisi mereka secara optimal. Dampak yang lebih luas adalah terjadinya proses marginalisasi bertahap terhadap warisan budaya lokal, dimana ketiadaan dukungan institusional pemerintah secara perlahan mengikis kapasitas masyarakat untuk mempertahankan situs sebagai ruang spiritual yang vital, sehingga pada akhirnya dapat mengancam kontinuitas pewarisan dan pelestarian nilai-nilai budaya tradisional kepada generasi mendatang.

Resistensi Diam: Strategi Pelestarian Alternatif

Menghadapi sikap netral pemerintah yang cenderung mem marginalisasi dimensi sakral situs, masyarakat dan kuncen mengembangkan apa yang dapat disebut sebagai "resistensi diam" (silent resistance) melalui praktik pemeliharaan mandiri dan swadaya komunal yang berlangsung secara konsisten tanpa dukungan formal dari otoritas pemerintah. Resistensi ini termanifestasi dalam berbagai kegiatan rutin seperti ngabersihan (pembersihan makam) setiap Jumat pagi, pelaksanaan ritual haul tahunan, pemeliharaan fisik makam, dan transmisi pengetahuan spiritual kepada generasi muda yang dilakukan secara organik oleh komunitas. Melalui perspektif Gramsci, resistensi diam ini dapat dipahami sebagai bentuk hegemoni perlawanan yang tidak konfrontatif namun efektif dalam

mempertahankan sudut pandang alternatif yang menentang dominasi sekular-rasional pemerintah. Kuncen dan warga yang masih mempercayai sakralitas situs secara turun-temurun menggunakan strategi ini untuk mempertahankan otonomi spiritual mereka sambil menghindari konflik terbuka dengan otoritas formal, sehingga menciptakan ruang sosial dimana tradisi dapat terus hidup dan berkembang meskipun tanpa legitimasi resmi.

Signifikansi resistensi diam ini terletak pada kemampuannya untuk menjamin kontinuitas dari nilai-nilai spiritual dan praktik budaya yang terancam oleh proses modernisasi dan sekularisasi. Melalui mekanisme pewarisan pengetahuan dari kuncen senior kepada generasi muda, serta pelibatan aktif keluarga-keluarga tradisional dalam kegiatan pemeliharaan, masyarakat berhasil menciptakan sistem regenerasi yang memastikan keberlanjutan tradisi tanpa bergantung pada dukungan institusional pemerintah. Dalam kerangka teori strukturalis Giddens, resistensi ini menunjukkan bagaimana agen-agen tradisional tidak hanya pasif mereproduksi struktur yang ada, tetapi juga secara kreatif mentransformasikan strategi pelestarian mereka untuk beradaptasi dengan kondisi struktural yang tidak menguntungkan. Fenomena ini mengonfirmasi bahwa meskipun hegemoni dominan berupaya mem marginalisasi praktik tradisional, komunitas lokal memiliki kapasitas resiliensi yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan identitas budaya dan spiritualitas mereka melalui jalur-jalur alternatif yang lebih asli dan berkelanjutan, sekaligus membuktikan bahwa pelestarian warisan budaya tidak selalu memerlukan dukungan formal dari otoritas negara untuk dapat berlangsung secara efektif.

PENUTUP

Tulisan ini mengungkapkan kompleksitas dinamika kuasa, interpretasi, dan legitimasi dalam pengelolaan warisan budaya Situs Makam Eyang Malandang yang mencerminkan pergulatan lebih luas antara modernitas dan tradisi di Indonesia kontemporer. Sikap "netral" pemerintah desa Buahdua yang tampak bebas nilai ternyata merupakan manifestasi dari teknologi kuasa hegemonik yang secara

sistematis berupaya memarginalisasi pandangan spiritual tradisional masyarakat melalui penolakan memberikan dukungan institusional terhadap praktik-praktik sakral. Kontradiksi interpretasi antara horizon rasional-birokratis pemerintah dengan horizon spiritual-tradisional warga lokal telah melahirkan dua sistem pengelolaan yang parallel, dimana minimnya dukungan formal justru memicu berkembangnya resistensi diam masyarakat melalui strategi pemeliharaan mandiri yang kreatif dan berkelanjutan. Temuan ini membuktikan bahwa meskipun hegemoni dominan berupaya mendelegitimasi praktik tradisional, komunitas lokal memiliki kapasitas resiliensi yang memungkinkan mereka mempertahankan identitas budaya dan spiritualitas melalui jalur-jalur alternatif yang lebih autentik, sekaligus menunjukkan bahwa pelestarian warisan budaya tidak selalu memerlukan legitimasi formal dari otoritas negara untuk dapat berlangsung secara efektif dan bermakna bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. Z. (2017). Pemikiran Hegemoni Antonio Gramsci (1891-1937) di Italia. *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan*, 3(2), 63–81.
- Faruk Fauzi, M. I. (2022). *Perawatan Warisan Budaya: Membangun Masa Depan Bangsa Sebuah Penelitian Pendahuluan*.
- Giddens, A. (2010). Teori Struktural: Dasar-dasar pembentukan struktur sosial masyarakat. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Judhananto, M. N., & Sitorus, F. K. (2025). Fusion of Horizons: Pemikiran Gadamer Mengenai Dialog dan Pemahaman dalam Kehidupan Manusia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(1), 12.
- Kuswandi, A., Al Rasyid, M. H., Nurani, S., & Sadiyyah, Z. N. (2024). Pengelolaan Bangunan Cagar Budaya Di Kota Bandung. *Governance*, 12(2), 147–167.
- Latifundia, E., & Prijono, S. (2018). Situs Tradisi Berlanjut Di Buahdua Sumedang. *Jurnal Panalungtik*, 1(1), 15–26.
- Maharani, S., & Asri, Z. (2020). Pengelolaan Situs Cagar Budaya di Kabupaten Agam: Rumah Gadang Angku Lareh ST. Harun (2012-2019). *Jurnal Kronologi*, 2(4), 130–139.
- Nashir, H. (2012). Memahami Struktural dalam Perspektif Sosiologi Giddens. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 7(1), 1–9.
- Putra, H. A. P., Sari, K. E., & Rukmi, W. I. (2022). Tindakan pelestarian kawasan cagar budaya makam Sunan Bonang Kabupaten Tuban. *Planning for Urban Region and Environment Journal (PURE)*, 11(2), 17–28.
- Siswati, E. (2017). Anatomi teori hegemoni antonio gramsci. *Jurnal Translitera*, 5(1), 11–33.
- Subadyo, A. T. (2018). Pelestarian Situs Makam Sunan Giri Secara Berkelanjutan. *Mintakat: Jurnal Arsitektur*, 19(1), 1–8.
- Sulistyanto, B. (2020). Benturan Kepentingan, Suatu Refleksi dalam Pengelolaan Warisan Budaya di Indonesia. *Kalpataru*, 29(2), 133–146.
- Wuryani, E., & Purwiyastuti, W. (2012). Menumbuhkan Peran Serta Masyarakat Dalam Melestarikan Kebudayaan Dan Benda Cagar Budaya Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Kawasan Wisata Dusun Ceto. *Satya Widya*, 28(2), 147–154.